###### KOP SURAT

Nomor : …………………

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Ketertarikan untuk mengikuti pengadaan pekerjaan Konsultan Hukum Pendamping Direktorat Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth,

Pokja Pengadaan pengadaan pekerjaan Konsultan Hukum Pendamping Direktorat Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pengumuman tentang undangan mengikuti pengadaan pekerjaan Konsultan Hukum Pendamping Direktorat Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 dengan ini kami lampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam surat tersebut, yaitu;

1. Akte Pendirian perusahaan beserta perubahan terakhir;
2. Bukti bahwa peserta atau masing-masing peserta (dalam hal berbentuk konsorsium) merupakan berbentuk firma hukum atau persekutuan perdata;
3. Surat perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) (dalam hal Peserta yang berbentuk konsorsium)
4. Setiap peserta atau anggota konsorsium memiliki kantor lokal di Indonesia dengan alamat yang tetap dan jelas;
5. Bukti/Keterangan bahwa memiliki tenaga ahli yang memiliki Surat Ijin Advokat dan/atau sertifikasi pengadaan;
6. Surat Pernyataan bahwa Penyedia tidak pernah atau sedang masuk dalam daftar hitam
7. Pakta Integritas;
8. NIB, dengan aktivitas “Jasa Konsultan Hukum” (Kode KBLI 69102);
9. Bukti pengalaman berupa salinan Kontrak Pekerjaan dengan minimal 2 paket pekerjaan pendampingan hukum proyek sektor telekomunikasi dan 1 paket pekerjaan pendampingan hukum di institusi pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun daerah) dalam 5 tahun terakhir (2017- 2021) dengan minimal nilai kontrak Rp. 3.000.000.000,-.
10. Surat Pernyataan bermeterai Tidak Melakukan Tuntutan Hukum jika lelang dibatalkan dengan alasan apa pun yang dapat dipertanggungjawabkan.

Alamat email yang akan didaftarkan untuk proses pengadaan ini adalah

*(email resmi dengan company name domain)*

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jakarta,

….Januari 2022

Nama firma hukum atau persekutuan perdata

Nama Jelas  
Jabatan